



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 188.4/64/SULBAR/I/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA  
PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DALAM LINGKUP  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat, perlu ditunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/1/SULBAR/I/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, perlu diganti karena adanya perubahan dan penambahan personil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

- Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
  13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai Tugas, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :
    - a. menyusun RKA-SKPD;
    - b. menyusun DPA-SKPD;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - h. menandatangani SPM;
    - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
    - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
    - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
    - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
  - Bendahara mempunyai tugas dan kewajiban :
    - a. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. bertanggung jawab atas isi kas dan keselamatan kas;
  - c. selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, harus menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas bulan sebelumnya kepada Gubernur Sulawesi Barat Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/1/SULBAR/1/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR SULAWESI BARAT,



H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada :

1. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 188.4/64/SULBAR/I/2020  
 TANGGAL : 30 JANUARI 2020  
 TENTANG : PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA-NAMA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN

PEMBANTU DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	SERETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	DR. MUHAMMAD IDRIS, M.Si NIP. 19641115 199303 1 001 PEMBINA UTAMA, IV/d	MUH. RISVAN DWI PUTRA DARWAN, SE NIP. 19860925 201001 1 018 PENATA MUDA, III/a	TAUPAN, SE NIP. 19810902 201001 1 015 PENATA MUDA, III/a		
2	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	DR. MUHAMMAD IDRIS, M.Si NIP. 19641115 199303 1 001 PEMBINA UTAMA, IV/d	JUSUJIATI, A.Md NIP. 19620610 200804 2 005 PENATA MUDA Tk.I, III/b	DAHLIANA, A.Md NIP. 19791213 201101 2 006 PENATA MUDA, III/a		
3	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. ANUJIB, MM 19720811 199303 1 010 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	ZAKIA DARJATI, SE NIP. 19821018 201504 2 001 PENATA MUDA, III/a	RASMAN NIP. 19730520 201001 1 007 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b SANRIANY Y. NIP. 19781012 201001 2 007 PENGATUR, II/c	HASMUDDIN, S.Pd NIP. 19810424 201001 1 019 PENATA, III/c	
4	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si NIP. 19711018 199101 1 001 PEMBINA Tk.I, IV/b	DWI AGUSTRIYANTI, S.Sos NIP. 19810823 200801 2 014 PENATA MUDA, III/a	FATMAWATI, SE NIP. 19820930 201001 2 014 PENATA, III/c JUMIYANTI LATIF, SE NIP. 19861014 201001 2 037 PENATA MUDA, III/a RITA SUZANNAH, A.Md NIP. 19821202 200902 2 008 PENATA MUDA, III/a		
5	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. H. ABDUL WAHAB HASAN SULUR, M.Si NIP. 19711018 199101 1 001 PEMBINA Tk.I, IV/b	INDAH NOVIANTI, A.Md NIP. 19881122 201101 2 011 PENATA MUDA, III/a			
6	INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT	SURYADI, SE NIP. 19671230 198803 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	SRIWULAN, A.Md,Com,SE NIP. 19860123 201101 2 016 PENATA MUDA, III/a	MESRAWATI, SE NIP. 19770212 201101 2 004 PENATA MUDA Tk.I, III/b DEDY IRAWAN S.P NIP. 19891218 201903 1 002 PENATA MUDA, III/a MULYANI NIP. 19851025 201001 2 035		

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGUJUA ANGGARAN/ PENGUJUA BARANG	BENDAHARA PENGELOMPOK	PEMANGKAT BENDAHARA PENGELOMPOK	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PENERIMAAN
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. ARIPUDDIN, M. Pd NIP. 19621231 198903 1 269 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	IRWAN SYARIPUDDIN, SE NIP. 19831228 201001 1 025 PENATA MUDA, III/a	MARDANATHA, SE NIP. 19731225 200701 2 015 PENATA, III/c		
8	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT	dr. H. MUHAMMAD ALIEF SATRIA LAHMUDDIN NIP. 19660403 200012 1 004 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	MARDAWIAH, SKM NIP. 19840517 201101 2 018 PENATA, III/c	MUFRIDAH M. NADIR, S. Farm NIP. 19840523 200902 2 004 PENATA, III/c		
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI BARAT	Ir. MUH. AKSAN, MT NIP. 19661011 199403 1 008 PEMBINA TK.I, IV/b	SURIANTI, SE NIP. 19801010 200701 2 030 PENATA MUDA TK.I, III/b	SRI HANDAYANI, A. Md, Kom NIP. 19850926 201101 2 022 PENATA MUDA, III/a	ARRAN, SE NIP. 19831101 201001 1 024 PENATA MUDA, III/a	ABD. RAHMAN S NIP. 19730823 200701 1 023 PENATA MUDA, III/a
10	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT	RACHMAD, SE, M.Si NIP. 19730219 199402 1 004 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	ARIANTI RAUF, ST NIP. 19800920 201001 2 026 PENATA, III/c	ASRA SUKAWATI NIP. 19861027 201410 2 001 PENGATUR MUDA, II/a	RAHMI, A. Md NIP. 19700502 201001 2 004 PENATA MUDA, III/a	
11	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	BAU AKRAM DAL, SE, M.Si NIP. 19751015 200112 1 006 PEMBINA TK.I, IV/b	ROSMIATI ADI, S.IP NIP. 19820715 201001 2 042 PENATA MUDA, III/a	SARI M. NIP. 19660502 201001 1 004 PENGATUR, II/c		
				ASRIWAN, S.IP NIP. 19840809 201001 1 028 PENATA MUDA, III/a		
				ANDI AKBAR, SE NIP. 19740103 200604 1 014 PENATA, III/c		
				ASMIIRAH, S.IP NIP. 19770622 200312 2 011		

NO	NAMA ORGANISASI PELAYAKAT DAERAH	PEGGUGA ANGGARAN/ PEGGUGA BARANG	BENDAHARA PENGELOUARAN	PEMATA MUDA, III/a PENGABTU BENDAHARA PENGELOUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN
	2	3	4	5	6	7
12	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. MADDARESKI SALATIN, M.Si NIP. 19711214 199202 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	ISWADI, S.I.P NIP. 19851210 201504 1 002 PENATA MUDA, III/a	NUR ALIYAH RAHMAN, S.I.P NIP. 19800331 201001 2 018 PENATA, III/c MUHAMMAD RIZAL, S.Sos NIP. 19801010 200801 1 015 PENATA MUDA Tk.I, III/b USUPADANG P. POLI, SE NIP. 19800812 201001 2 034 PENATA MUDA Tk.I, III/b		
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLUDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BEREKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT	Hj. DARMAWATI, S.Pi., MM NIP. 19720713 200003 2 003 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	SAPRIANI K, SE NIP. 19800608 200901 2 004 PENATA MUDA, III/a	FADILAH, SE NIP. 19791028 201001 2 018 PENATA MUDA Tk.I, III/b NARIMANG, S.I.P NIP. 19821104 201001 2 007 PENATA MUDA Tk.I, III/b HASNIA, SE NIP. 19780529 201504 2 001 PENATA MUDA Tk.I, III/b		
14	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	H. RIDWAN, SE, M.Si NIP. 19601231 198702 1 050 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	RACHMAWATI ARIFIN, SE NIP. 19780120 201001 2 011 PENATA MUDA Tk.I, III/b	Hj. ARISA KADIR, SE NIP. 19710916 201410 2 003 PENATA MUDA, III/a AHMAD NIP. 19840810 201001 1 026 PENATA MUDA, III/a RUSGAN NIP. 19820407 201001 1 016 PENGABTU, II/c		
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI BARAT	ACO TAKDIR, S.Sos., M.Pd NIP. 19670702 199103 1 011 PEMBINA Tk.I, IV/b	ACO RUSLAN NIP. 19800910 201504 1 002 PENATA MUDA, III/a	DESIANA MALINO, S.Si, MM NIP. 19821231 200902 2 006 PENATA, III/c MUNIAH AHMAD, SH NIP. 19681201 201001 2 001 PENATA MUDA Tk. I, III/b BERTHA BILIK, SE NIP. 19791020 201504 2 003 PENATA MUDA, III/a LAURENTIA LONDONGALLO, A.Md NIP. 19811029 201001 2 006 PENATA MUDA III/a		
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA NIP. 19690319 198811 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	YEMMI NOFIANTI, S.I.P NIP. 19812010 201001 2 020 PENGABTU, II/c	RAHMAWATI NIP. 19890520 201001 2 002 PENGABTU, II/c NURHAYATI NIP. 19781215 201001 2 017 PENGABTU, II/c		

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGURUS ANGGARAN / PENGURUS BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBAYU			
				BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN	
1	2	3	4	5	6	7	
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI BARAT	MUHAMMAD JAVN, S. IP, MM NIP. 19720501 199202 1 001 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	HAMBRIANA NIP. 19800229 201001 2 021 PENGATUR, II/c	HASNINA, S. IP NIP. 19820902 201001 2 020 PENATA MUDA, III/a HARMI INDRAWATI HP, S. IP NIP. 19860425 201001 2 021 PENATA MUDA, III/a DAVID, S. IP NIP. 19730127 200901 1 003 PENATA TK. I, III/d NURAEINI, SE NIP. 19810131 201001 2 021 PENATA, III/c YOHANIS SAPAN, SE NIP. 19830120 201504 1 003 PENATA MUDA, III/a ALBI, S. HI NIP. 19831115 201504 1 001 PENATA MUDA, III/a RISMAVANTI, SE NIP. 19800228 201001 2 021 PENATA MUDA TK. I, III/b YERLIANTO NIP. 19870428 201001 1 003 PENATA MUDA, III/a MURSYID NIP. 19800307 201001 1 019 PENGATUR MUDA TK. I, II/d ERLIN JAYANTI NIP. 19860725 201001 2 038 PENGATUR, II/c JAMILA A NIP. 19850702 201001 2 038 PENGATUR, II/c MUHAMMAD HABBI NIP. 19801229 201001 1 019 PENGATUR, II/c SUKMAWATI, S. Pd NIP. 19770224 201001 2 006 PENATA, III/c Hj. MASTITA, ST. NIP. 19811030 201410 2 002 PENATA MUDA, III/a MAS'AD, A. Md NIP. 19800428 201408 1 001 PENGATUR TK. I, II/d			
18	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. H. KHAERUDDIN ANAS, M. Si NIP. 19651127 198603 1 009 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	MARNI, SE NIP. 19810404 201001 2 030 PENATA MUDA, III/a				
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT	SAFARUDDIN SANUSI DM, S. Sos, MAP NIP. 19721231 199402 1 017 PEMBINA TK. I, IV/b	RAHMAVANTI, SE NIP. 19801201 201001 2 027 PENATA MUDA, III/a				
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT	H. BAHHTAR HS., S.E., MH. NIP. 19620707 199208 1 002 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	AHMAD AMIRUDDIN, A. Md, Kom NIP. 19850502 200804 1 003 PENATA MUDA, III/a				
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAQA PROVINSI SULAWESI BARAT	H. MUHAMMAD HAMZIH, S. Ag, MM NIP. 19670313 199803 1 003 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	KASIMIR, S. Sos NIP. 19830303 201001 1 014 PENATA, III/c				



NO	NAMA ORGANISASI PEKERJAAT DAERAH	PEGGUWA ANGGARAN / PEGUWA BARANG	BENDAHARA PENGELOUARAN	BENDAHARA PENGELOUARAN	BENDAHARA PENERTAAH	BENDAHARA PENERTAAH
1	2	3	4	5	6	7
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Dra. DARMAWATI, MM NIP. 19660919 199303 2 010 PENBINA Tk.I, IV/b	MUHAMMAD AMIN, S.A.P NIP. 19820817 201101 1 013 PENATA MUDA, III/a	MERCY SNIWASTY, SE NIP. 19810808 201001 2 016 PENATA, III/c WAHIDA, A.Md NIP. 19790517 201001 2 025 PENATA MUDA, III/a MASITA NIP. 19851115 201502 2 001 JURU Tk.I, I/d		
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	SYAMSUL MA'NIP, SP, MMA NIP. 19680513 199803 1 007 PEMBINA Tk.I, IV/b	AFRIZAL, SE NIP. 19841209 201101 1 009 PENATA MUDA, III/a	NORMAH, SP NIP. 19800225 201001 2 026 PENATA MUDA Tk.I, III/b SELISITAWATI, A.Md.P NIP. 19870907 201403 2 001 PENGATUR Tk.I, II/d SATRIANI NIP. 19811229 201504 2 001 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b	ACHMAD MUNIR NIP. 19850929 201504 1 001 PENGATUR MUDA Tk.I, II/b	
24	DINAS PARAWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT	Dra. FARID WAJDI, M.Pd NIP. 19690610 199503 1 012 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	NURHASANAH, SE NIP. 19781006 201001 2 016 PENATA, III/c	SAMSUDDIN NIP. 19750811 201001 1 014 PENGATUR, II/c DEWI NIP. 19810116 201001 1 023 PENGATUR, II/c NURMI SAKKE NIP. 19800228 201101 2 003 PENGATUR, II/c	RAHMAYUNIRA NIP. 19811023 201001 2 010 PENGATUR, II/c	
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	MUHTAR, SP NIP. 19641231 198711 1 036 PEMBINA Tk.I, IV/b	MAS'UD, SP NIP. 19750703 201101 1 002 PENATA MUDA, III/a	ASNI RAMMA, SE NIP. 19800829 201001 2 023 PENATA MUDA Tk.I, III/b IDHAM, A.Md.P NIP. 19800607 201001 1 029 PENATA MUDA, III/a	MUHAMMAD HATTA, SE NIP. 19800728 201001 1 016 PENATA MUDA Tk.I, III/b	
				ASRAR TANAWALI NIP. 198606182015041002 PENGATUR MUDA, II/a		

NO	NAMA ORGANISASI PELAKSANA DAERAH	PENGGUNA Anggaran / PENGGUNA BARANG	BERDAHARA PENGELUARAN	PEMBAYU BERDAHARA PENGELUARAN	BERDAHARA PENERIMAAN	BERDAHARA PENERIMAAN PERBANTU
1	2	3	4	5	6	7
31	SATUAN POLISI PANGRONI PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI SULAWESI BARAT	H. DARWIN JUSUF, SH, M.Si NIP. 19661231 199003 1 155 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	SYARIFUDDIN, S.Ip NIP. 19830203 201001 1 023 PENATA MUDA, III/a	MUH. DADANG, S.IP NIP. 19820623 201001 1 028 PENATA MUDA, III/a RINA KURNIAWATI, S.Soc NIP. 19860312 201001 2 038 PENATA MUDA, III/a YUSRAN NIP. 19830815 201001 1 038 PENGATUR, II/c		
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT	Dra. H. MUHAMMAD RAHMAT, MIM NIP. 19640408 198603 1 023 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	ASMAUL HUSNA AMIN, SE NIP. 19880406 201101 2 014 PENATA, III/c	AHMAD AMIRUDDIN, S.IP, M.Ec, Dev NIP. 19821091 201001 1 018 PENATA, III/c ADNAN NIP. 19811129 201001 1 016 PENGATUR, II/c SYARIPAH RAODAH NIP. 19721014 201408 2 001 PENGATUR MUDA Tk.1, II/b		
33	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	H. DARNO MAJID, S.Pd, M.Pd NIP. 19631228 198206 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	I GDE NGURAH ANDIANA PUTRA, SE NIP. 19840813 201001 1 018 PENATA, III/c	JUFRI, S.Soc NIP. 19830810 201001 1 018 PENATA MUDA Tk.1, III/b AMIRA A., SE NIP. 19850425 201410 2 002 PENATA MUDA, III/a SUARNI NIP. 19801231 201001 2 013 PENGATUR, II/c		
34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	DR. JUNDA MAULANA, M.Si NIP. 19710608 199101 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	AZWAR ASMAR, SE NIP. 19810130 200604 1 005 PENATA, III/c	NURASIAH, S.IP NIP. 19820919 200701 2 013 PENATA, III/c NURSALAM, S.IP NIP. 19820606 201001 1 023 PENATA MUDA Tk.1, III/b LILISIANA NIP. 19831217 201001 2 035 PENGATUR, II/c		

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEGGUGIA ANGGARAN/ PENGGUGIA BARANG	BENDAHARA PENGETUARAR	PENBAHTU BENDAHARA PENGETUARAR	BENDAHARA PERIKEMAMAN	BENDAHARA PERBAHTU
1						
26	DINAS PERKEBUNGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Ir. H. ABD. WARIS BESTARI NIP. 19651201 199703 1 005 PEMBINA Tk. I, IV/b	VERAWATY YUSUF, SE NIP. 19800524 200312 2 009 PENATA MUDA Tk.I, III/b	AMRIN NIP. 19841205 201001 1 019 PENGATUR, II/c ARTHA MENDAWATY NIP. 19820523 201001 2 029 PENGATUR, II/c NURMADINAH, S.Sos NIP. 19771212 201001 2 010 PENATA, III/c	MASRYANG SYAH, SE NIP. 19810724 200902 1 002 PENATA, III/c	
27	DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Ir. H. FAKHRUDDIN HD NIP. 19620920 199403 1 003 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	HERMAWANTO, S.Hut NIP. 19821003 201403 1 002 PENATA MUDA Tk. III/b	NALVIEN, S.Hut NIP. 19820506 201001 2 013 PENATA, III/c ASNA BUNGA TODING, SE NIP. 19800817 201101 2 016 PENATA, III/c SRI SULASTRI, S.Hut NIP. 19890305 201403 2 002 PENATA MUDA Tk.I, III/b	H. HAMKA PATTAH, S.IP.,M.Si NIP. 19761227 199803 1 008 PENATA Tk.I, III/d	
28	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI BARAT	AMRI EKASAKTI, ST NIP. 19670704 199403 1 022 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	RAHMAT SYARIF, SE NIP. 19820727 201001 1 033 PENATA MUDA Tk. I, III/b	ARMAWATI, ST NIP. 19780520 201001 2 018 PENATA, III/c NURRHA HANAFI NIP. 19770428 200801 2 014 PENGATUR, II/c		
29	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI BARAT	Dra. H. AMIR MARICAR, MM. NIP. 19640309 198903 1 009 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	ZULKRI, SE NIP. 19820320 201504 1 0018 PENATA MUDA, III/a	SURYA DHARMAWAN NIP. 19840820 201001 1 030 PENGATUR, II/c ANDI YUNI ANDRIANI NIP. 19850724 201001 2 040 PENGATUR, II/c RHONI SAPUTRA NIP. 19810612 201101 1 015 PENGATUR, II/c		
30	DINAS TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI BARAT	Dra. H. HERDIN ISMAIL, MM. NIP. 19700701 199101 1 004 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	JUMARDIN, A.Md.Pi, SE NIP. 19820127 201403 1 001 PENATA MUDA, III/a	UMMI ALIM NAIM, SE NIP. 19790531 200604 2 026 PENATA Tk. I, III/d NURMAATI NIP. 19840117 201001 2 027 PENATA MUDA Tk.I, III/b ASTUTI NIP. 19850902 201410 2 001 JURU Tk.I, I/d		

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELOMPOK	PEMBANTU BENDAHARA PENGELOMPOK	BENDAHARA PERBIBLIOTHECA
1					
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Drs. AMKUIB, MM 19720511 199303 1 010 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	NURHAYATI, SE NIP. 19861110 201001 2 051 PENATA MUDA Tk.I, III/b	NURDIAH NURDIN NIP. 19821121 201001 2 024 PENATA MUDA Tk.I, III/b	SARDIPAWATI, SE NIP. 19770228 201001 2 011 PENATA MUDA Tk.I, III/b
			SITI NURHUSAIMAH D NIP. 19900118 201101 2 004 PENATA MUDA, III/a		ARIBADI DJALILKA, S.IP NIP. 19860416 200901 1 001 PENATA MUDA Tk.I, III/b (UPTB SAMSAT MAMUJU)
			MARWA HAMDANI NIP. 19820121 201101 2 006 PENGATUR, II/c		SRI SALTI, SE NIP. 19770517 2010012 017 PENATA, III/c (UPTB SAMSAT MAJENE)
					DEDEN HARLI SUNANTRY, SH NIP. 19890203 201101 1 004 PENATA, III/c (UPTB SAMSAT POLMANI)
					MUH. SYAIFUL IHSAN NIP. 19800718 201001 1 024 PENATA MUDA Tk.I, III/b (UPTB SAMSAT MAMASA)
					ABD. QADIR NIP. 19730706 201001 1 010 PENGATUR, II/c (UPTB SAMSAT PASANGKAYU)
36	BADAN KEPECAWAJIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	H.ZULKIFLI MANGGAZALI, SE, M.Si NIP. 19661231 199003 1 144 PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	HERSANDI, S.Kom NIP. 19861107 201101 1 013 PENATA MUDA, III/a	RIZAL, JUFRI NIP. 19840602 201101 1 013 PENATA MUDA, III/a	
			ROSDIANA NUR, A.Md.,Kom NIP. 19830913 201101 2 016 PENATA MUDA, III/a		
			MARDINSYAH NIP. 19870501 201001 1 005 PENGATUR II/c		
37	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT	DR. YAKUB SOLOH, SH., M.Pd NIP. 19651005 198812 1 002 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	KORNELIUS PALLUNAN, SE NIP. 19770601 200604 1 030 PENATA MUDA Tk.I, III/b	PIRMAN, SE NIP. 19831115 201001 1 025 PENATA MUDA Tk.I, III/b	MULIANTI BASRI, SE NIP. 19851124 201001 024 PENATA MUDA Tk.I, III/b
			YENI LIES NIP. 19830327 201001 2 030 PENGATUR, II/c		
			UMAR NIP. 19770325 201001 1 010 PENGATUR, II/c		

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PEGOWA ANGGARAN / PEGOWA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PENANTU BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PERBATAS
1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	Dr. H. MUH JAMIL BARAMBANGI, M.Pd NIP. 19631120 199203 1 001 PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d	NURTAMININGSIH, S. Kom NIP. 19830322 201101 2 006 PENATA, III/c	FRANS PAKIDING, ST NIP. 19840413 201101 1 009 PENATA, III/c FADLAN, S.IP, M.AP NIP. 19830510 200504 1 015 PENATA MUDA, III/a NURYANTI MUCHSIN NIP. 19850323 201001 2 053 PENGATUR, II/c		
38	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI BARAT	Hj. GEMILANG SUKMA MUTIARA MARYANI, S.P., M.A.P. NIP. 19810319 200604 2 033 PENATA TK.I, III/d	RIYANTI AGUSTIN NIP. 19850812 201001 2 040 PENGATUR, II/c	SITTI FATIMAH, SP NIP. 19721023 201001 2 004 PENATA, III/c RONALDIE, SE NIP. 19830618 201504 1 002 PENATA MUDA, III/a ASLIH KAMAL, SE NIP. 19760218 201410 2 001 PENATA MUDA, III/a	FERONIKA SATTU NIP. 19720205 201410 2 002 PENGATUR MUDA TK.I, II/b	MARIAM, SE NIP. 19740327 200902 2 001 PENATA, III/c
39	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	dr. Hj. INDAHWATI NURSYAMS, M.Kes NIP. 19690306 200212 2 002 PEMBINA TK. I, IV/b	RASMIA AR, SKM NIP. 19850716 201101 2 018 PENATA, III/c	IKA SUSANTI SAHIDA, S.Kep NIP. 19891230 201101 2 019 PENATA, III/c ANDI ANHAR NIP. 19850402 201408 1 001 JURU, I/c		
40						

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. M. ALI BAAL MASDAR

